



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

DETERMINAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA SELATAN

Citra Indah Merina¹, Verawaty², Diana Rahmawati³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: citraindah@binadarma.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: verawaty@binadarma.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, email: dianarahmawati30@yahoo.com

Abstract

The government internal control system is aimed at providing adequate assurance to achieve efficiency and effectiveness in achieving the objectives of state governance, reliability of financial reporting, safeguarding state assets, and compliance with laws and regulations. The purpose of this study is to examine the effect of economic growth, local government size, local revenue, regional complexity, and capital expenditure on the weakness in local government internal control. The sample was 17 local governments of South Sumatra in 2015-2017. The study used quantitative analysis techniques with multivariate regression. The results showed that only economic growth had a positive effect on the weakness in internal control. This is because the higher the economic growth, the level of internal control weakness will also be high so that the local government will further improve the quality of its internal control. Local governments must be monitored to ensure that management is carried out in full compliance with various regulations so that the possibility of committing fraud or corruption is less likely.

Keywords: *Weakness of internal control, economic growth, size of local government, local revenue, regional complexity, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Saat ini banyak terjadi kecurangan finansial yang dilakukan oleh orang pribadi maupun kelompok secara disengaja. Kecurangan biasanya terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern. Hal ini disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Regulasi SPIP menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara khusus, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Di dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta dapat meningkatkan pengendalian atau pengawasan pada pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi, agar di masa depan diharapkan bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Maka untuk mengurangi terjadinya kecurangan, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern yang baik dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat 4 dan pasal 56 ayat 4, pengelolaan APBN dan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berikut merupakan data mengenai temuan kelemahan sistem pengendalian intern di 17 kabupaten/kota dalam dua tahun yaitu 2016 dan 2017.

Tabel 1 Jumlah Temuan Kelemahan SPI

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Temuan Kelemahan SPI	
		2016	2017
1	Kab. Banyuasin	12	8
2	Kab. Empat Lawang	7	16
3	Kab. Lahat	6	5
4	Kab. Muara Enim	8	5
5	Kab. Musi Banyuasin	10	8
6	Kab. Musi Rawas	7	13
7	Kab. Musi Rawas Utara	10	10
8	Kab. Ogan Ilir	15	15
9	Kab. Ogan Komering Ilir	5	11
10	Kab. Ogan Komering Ulu	14	10
11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	8	6
12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	15	12
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7	10
14	Kota Lubuk Linggau	6	2
15	Kota Pagar Alam	7	7
16	Kota Palembang	10	10
17	Kota Prabumulih	7	8

Sumber: BPK (2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat masih ada jumlah temuan kelemahan SPI yang meningkat dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Prabumulih. Lalu masih ada jumlah temuan kelemahan SPI yang menurun dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Kota Lubuk Linggau. Namun, ada juga jumlah temuan kelemahan SPI yang tetap dari tahun 2016 ke 2017, seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Palembang.

Pada umumnya kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada instansi pemerintah daerah karena pelaksana tidak melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum ada kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait serta lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kasus yang terjadi. BPK telah merekomendasikan agar pimpinan instansi yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan cermat serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang terjadi telah diketahui bahwa laporan keuangan di instansi pemerintahan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana masyarakat dapat melihat keuangan pemerintah daerah dengan mudah sehingga dapat mengetahui ada atau tidaknya tindak kecurangan. Namun pada kenyataannya tindak kecurangan atau penyelewengan masih kerap dilakukan oleh pejabat daerah. Hal ini berarti pengendalian di suatu pemerintah daerah masih kurang baik. Oleh sebab itu, hal inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern, yang nantinya peneliti berharap dengan adanya pengaruh dari kelemahan pengendalian intern akan dapat meningkatkan pengendalian intern di suatu instansi pemerintahan.

Dalam menjalankan era reformasi yang sistem pemerintahannya telah terdesentralisasi, sangat penting untuk meningkatkan pengendalian intern pada instansi pemerintah. Dengan meningkatkan kualitas pengendalian intern yang lebih baik, maka dapat mengurangi tingkat kecurangan atau penyimpangan yang terjadi sehingga masyarakat akan meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Dalam penelitian ini, faktor-faktor penentu (determinan) yang akan dibahas adalah pertumbuhan ekonomi, *size* (ukuran) pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh kelima determinan tersebut terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan bagi pengembangan pengendalian intern pada pemerintah daerah dan saran bagi pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan pengendalian intern.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pihak yang memberi wewenang yang disebut sebagai *principal* dengan pihak yang menerima wewenang disebut dengan *agent* dalam sebuah kontrak untuk melakukan jasa (*service*) atas nama (*principal*). *Agency theory* menyatakan bahwa konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan adanya perbedaan informasi antara *principal* dan *agent*. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika ada distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*.

Teori keagenan atau *agency theory* dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam Verawaty (2017) yang menggambarkan hubungan *agency* sebagai suatu kontrak perjanjian dibawah satu atau lebih (*principal*) yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada

(*agent*) untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*.

Verawaty (2017) meyakini bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka analitis yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan *monitoring* oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh *agent*.

Jika dikaitkan dengan kelemahan pengendalian intern maka pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan pengawasan oleh *principal* atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* sehingga kemungkinan untuk melakukan tindak kecurangan atau korupsi menjadi lebih kecil dikarenakan semakin berkurangnya *information asymmetry* karena korupsi merupakan bukti penyebab terhambatnya tata kelola yang baik atau *good governance* (Verawaty, dkk., 2019).

Sistem Pengendalian Intern

Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik. Menurut Bastian (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personal), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

COSO menjelaskan bahwa, pengendalian intern dipercaya dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya entitas. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja dari sebuah entitas dan manajemennya, serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Komponen pengendalian intern, yaitu meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.

Pengendalian intern belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif meskipun dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya karena keberhasilannya terletak pada kompetensi dan pelaksanaannya. Kesalahan dan penyelewengan masih akan terjadi walaupun telah menerapkan pengendalian intern dalam suatu entitas. Sebab tidak ada satu pun pengendalian intern yang dapat mencapai kata ideal, karena ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin pengendalian intern tersebut tercapai (Kristanto, 2009).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dijalankan oleh orang-orang guna memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna informasi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan diterapkannya pengendalian intern diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan

yang dapat merugikan suatu entitas seperti kecurangan, penyelewengan, dan penggelapan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh suatu entitas. Untuk mencapai tujuan entitas tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dirancang dan disusun harus dilakukan pengawasan untuk mencegah atau mengurangi tindakan yang dapat merugikan suatu entitas.

Tujuan pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2016) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik suatu entitas
Manajemen memerlukan informasi yang teliti dapat dipercaya dan tepat pada waktunya untuk mengolah kegiatan-kegiatan entitas.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
Pengawasan yang memadai diperlukan untuk melindungi barang-barang atau harta milik entitas yang mungkin hilang karena dicuri, disalahgunakan, rusak karena kecelakaan atau musibah dan sebab-sebab lain yang dapat merugikan entitas.
3. Mendorong efisiensi kerja atau operasional entitas
Mekanisme pengawasan atau pengendalian intern yang diasosiasikan dengan para personil dan kegiatannya, dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari terjadinya berbagai peristiwa dan keadaan yang berakibat timbulnya inefisiensi operasi manajemen.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen
Kebijaksanaan peraturan dan prosedur-prosedur pelaksanaan itu ditetapkan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Sistem pengadilan intern beserta mekanismenya diciptakan untuk manajemen bahwa semua kebijakan, peraturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan itu selalu dipatuhi oleh entitas.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) dalam Hartono, dkk. (2014) menyatakan kelemahan pengendalian intern merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945, Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam organisasi pemerintah. Dalam IHPS BPK RI disebutkan kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, yang meliputi:
 - a. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat
 - b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
 - c. Entitas terlambat menyampaikan laporan
 - d. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
 - e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyeteroran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan tidak memadai
 - b. Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan
 - c. Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja

- d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
 - e. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan
 - f. Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
3. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada atau tidaknya struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa, meliputi:
- a. SOP belum disusun
 - b. SOP tidak ditaati
 - c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern
 - d. Satuan pengawas intern tidak optimal
 - e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

Menurut Mulyadi (2016), terdapat lima keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan
Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan tekanan lain.
2. Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami pemerintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.
3. Kolusi
Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi, Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi.
5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.

Pengembangan Hipotesis

- H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern
H2: Size (ukuran) pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern
H3: Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern
H4: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern
H5: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia pada tahun 2015-2017. Teknik

Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara *nonprobability sampling* yaitu dengan metode *sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2018), *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sesuai dengan objeknya penelitian ini menggunakan data 17 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan pada tahun 2015-2017 sehingga total sampel yang digunakan adalah 51 unit sampel. Adapun kriteria yang diambil sebagai sampel adalah:

1. Laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari badan pemeriksa keuangan yang dipublikasikan pada tahun 2015-2017.
2. Jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) pemerintah daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada tahun 2015-2017.
3. Menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang diterbitkan oleh BPK.
4. Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur adalah pertumbuhan ekonomi, *size* (ukuran) pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah dan belanja modal.

Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel diatas, tabel berikut ini menyajikan sampel dengan metode *sampling jenuh*.

Tabel 2. Daftar Nama Sampel Pemerintah Daerah Sumsel

No	Pemerintah Daerah	No	Pemerintah Daerah
1.	Kab. Banyuasin	10.	Kab. Ogan Komering Ulu
2.	Kab. EmpatLawang	11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
3.	Kab. Lahat	12.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
4.	Kab. MuaraEnim	13.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
5.	Kab. MusiBanyuasin	14.	Kota Lubuk Linggau
6.	Kab. Musi Rawas	15.	Kota Pagar Alam
7.	Kab. Musi Rawas Utara	16.	Kota Palembang
8.	Kab. Ogan Ilir	17.	Kota Prabumulih
9.	Kab. Ogan Komering Ilir		

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Dari jumlah 17 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini, maka ditariklah 51 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang dijadikan sampel dengan menggunakan dua periode yaitu tahun 2015-2017.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2018), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa tanda atau konsep obyek penelitian yang bisa diukur atau diamati sehingga penelitian dapat diketahui hasil penelitian tersebut. Berikut adalah tabel operasional variabel:

Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Y	Kelemahan Pengendalian Intern	Kelemahan yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi.	Jumlah temuan kasus	Nominal
X1	Pertumbuhan	Salah satu tujuan yang ingin	Selisih antara Produk	Rasio

Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

	Ekonomi	dicapai pemerintah agar dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik	Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini dengan PDRB sebelumnya dibandingkan dengan PDRB sebelumnya	
X2	Size (Ukuran)	Suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang atau kecil suatu objek tertentu.	Total aset	Nominal
X3	PAD	Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Nominal
X4	Kompleksitas Daerah	Tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat organisasi yang tersebar secara geografis untuk mencapai tujuan	Jumlah kecamatan yang dimiliki pemerintah daerah	Nominal
X5	Belanja Modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	Jumlah belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah	Nominal

Teknik Analisis

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan beberapa variabel independen (X). Hubungan matematis yang digunakan sebagai suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksikan nilai (Y) berdasarkan nilai (X) tertentu. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen dalam suatu penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu dengan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, *size* (ukuran) pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Kelemahan pengendalian intern

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien regresi

X1 = Pertumbuhan ekonomi

X2 = *Size* (ukuran) pemerintah daerah

X3 = Pendapatan asli daerah (PAD)

X4 = Kompleksitas daerah

X5 = Belanja modal

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kelemahan pengendalian intern, pertumbuhan ekonomi, size (ukuran) pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas dan belanja modal.

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
KPI	51	2,00	19,00	11,3922	4,23357
Pertumbuhan Ekonomi	51	2279,64	130415,09	21339,0210	28583,48972
Size Pemerintah Daerah	51	11,83	13,13	12,4352	,24108
PAD	51	10,34	12,42	11,0227	,43385
Kompleksitas Daerah	51	5,00	24,00	13,7059	5,76296
Belanja Modal	51	11,21	11,93	11,5277	,17102
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Output SPSS 22, diolah 2019

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penelitian, terlihat bahwa dari 51 data kota/kabupaten yang menjadi sampel penelitian. Kelemahan pengendalian intern diukur dengan jumlah kasus, dimana kelemahan pengendalian intern dalam penelitian ini mempunyai nilai rata-rata yaitu 11,3922 dengan standar deviasi 4,23357, yang mana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata kelemahan pengendalian intern. Demikian pula nilai minimum sebesar 2,00 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 19,00 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21339,02 dengan standar deviasi sebesar 28583,48 dimana nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi. Demikian pula nilai minimum sebesar 2279,64 yang lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 130415,09 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Size (ukuran) pemerintah daerah mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,4352 dengan standar deviasi sebesar 0,24108 dimana nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata ukuran pemerintah daerah. Demikian pula nilai minimum sebesar 11,83 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 13,13 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Pendapatan asli daerah mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,0227 dengan standar deviasi sebesar 0,43385 dimana nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata PAD. Demikian pula nilai minimum sebesar 10,34 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Berbeda dengan nilai maksimum sebesar 12,42 lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Kompleksitas daerah mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13,7059 dengan standar deviasi sebesar 5,76296 dimana nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata kompleksitas daerah. Demikian pula nilai minimum sebesar 5,00 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 24,00 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Belanja modal mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,5277 dengan standar deviasi sebesar 0,17102 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil pada nilai rata-rata belanja modal. Demikian pula nilai minimum sebesar 11,21 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 11,93 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Hasil Analisis Regresi

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel di atas $\alpha = 0,05$

yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai *absolute* residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Pada hasil uji *run test* penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya.

Berikut hasil regresi uji signifikan parameter individual:

Tabel 5. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	138,275	69,941		1,977	,054
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	7,3995	,000	,500	2,051	,046
Size Pemerintah Daerah (X2)	-2,054	1,659	-,269	-1,238	,222
PAD (X3)	1,572	2,304	,161	,683	,498
Kompleksitas Daerah (X4)	-,014	,120	-,019	-,115	,909
Belanja Modal (X5)	-3,270	2,279	-,304	-1,435	,158

Sumber: Output SPSS22, diolah2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $t_{hitung} 2,051 > t_{tabel} 2,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,046 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, bahwa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
2. Size Pemerintah daerah memiliki nilai $t_{hitung} -1,238 < t_{tabel} 2,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,222 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
3. Pendapatan asli daerah memiliki nilai $t_{hitung} 0,638 < t_{tabel} 2,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,498 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
4. Kompleksitas daerah memiliki nilai $t_{hitung} -0,115 < t_{tabel} 2,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,909 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.
5. Belanja modal memiliki nilai $t_{hitung} -1,435 < t_{tabel} 2,014$ dan nilai signifikan sebesar $0,158 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dibuktikan variabel X1 atau pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t hitung 2,051 dan nilai signifikan sebesar $0,046 < 0,05$ serta arah koefisiennya positif artinya H_1 diterima maka dapat disimpulkan

bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka tingkat kelemahan pengendalian internnya juga akan semakin tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di masa globalisasi seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi terjadi sangat cepat dan mengakibatkan banyak perubahan tentunya hal tersebut terjadi dengan masalah pengendalian internnya, sehingga mengakibatkan masih banyaknya ditemukan temuan kasus kecurangan oleh BPK pada sektor pemerintah daerah.

Alasan lain yang mendasari adalah semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan jumlah kasus kelemahan pengendalian intern hal ini dikarenakan banyaknya pejabat daerah untuk melakukan tindak korupsi atau penyelewengan sehingga masih banyaknya ditemukan kasus kecurangan yang ditemukan oleh BPK. Hal ini terbukti dalam temuan kasus kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh BPK RI perwakilan Sumatera Selatan di kota Palembang yang memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,43% pada tahun 2016 dengan begitu BPK menemukan kasus kecurangan yang cukup besar yaitu sebanyak 19 kasus kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hartono dkk (2014), Putro (2014), Rachmawati dan Nur (2016), Majid dkk (2017) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh *Size* (Ukuran) Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel independen yaitu *size* (ukuran) pemerintah daerah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dibuktikan variabel X_2 atau *size* (ukuran) pemerintah daerah memiliki nilai t hitung $-1,238$ dan nilai signifikan sebesar $0,222 > 0,05$ serta arah koefisiennya negatif artinya H_2 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa *size* (ukuran) pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa besar atau kecilnya ukuran suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi banyaknya jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah telah melakukan peningkatan kualitas pengendalian internnya sehingga pengendalian intern yang diterapkan di pemerintah daerah kota/kabupaten Sumatera Selatan dalam mengelola aset telah dilaksanakan dengan baik. Semakin besarnya ukuran pemerintah daerah kota/kabupaten pemerintah daerah di Sumatera Selatan menunjukkan birokrasi yang semakin kompleks dan memiliki sumber daya yang cukup akan mampu membuat instansi pemerintah meningkatkan pengawasan internal serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan sistem pengendalian intern.

Alasan lain yang mendasari adalah semakin besar ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang sudah melaksanakan otonomi daerah dengan baik dengan cara mengelola dan mengawasi aset yang dimiliki daerahnya. Maka pemerintah telah mampu memanfaatkan asetnya untuk kepentingan masyarakat atau publik. Namun ada beberapa bukti empiris juga yang menemukan hubungan terbalik dimana ukuran pemerintah yang besar dapat menurunkan jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian intern.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim (2015), Rachmawati dan Nur (2016) menemukan hasil yang sama yaitu menyatakan bahwa *size* (ukuran) pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nurwati dan Trisnawati (2015), Putro (2014) menemukan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dibuktikan variabel X3 atau pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung 0,649 dan nilai signifikan sebesar $0,520 > 0,05$ serta arah koefisiennya positif artinya H3 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi belum menjamin pengendalian internnya lebih baik daripada pemerintah daerah yang memiliki PAD lebih rendah. Dengan begitu meningkat atau menurunnya pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh sejak semakin banyaknya terjadi tindakan penyelewengan dan kasus korupsi pada dana pendapatan dan APBD yang melibatkan pejabat daerah membuat PAD sebagai salah satu sasaran untuk melakukan tindakan korupsi, maka dari itu pengendalian intern yang diterapkan pemerintah menjadi lebih ditingkatkan sehingga masalah tentang pengendalian internnya dapat diminimalisir.

Alasan lain yang mendasari adalah semakin meningkat atau menurunnya suatu pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah telah melakukan perhatian khusus atau pengawasan terhadap hasil pendapatan dan anggaran pendapatan belanja daerah agar tidak terjadinya tindak penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat daerah dengan begitu, tujuan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan demi kepentingan rakyat dapat dilakukan dengan efektif.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013), Nurwati dan Trisnawati (2015) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono, dkk. (2014), Martani dan Zaelani (2014), Rachmawati dan Nur (2016), Majid (2017) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil temuan yang dilakukan oleh Putro (2014) menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel independen yaitu kompleksitas daerah menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dibuktikan variabel X4 atau kompleksitas daerah memiliki nilai t hitung $1 - 0,115$ dan nilai signifikan sebesar $0,909 > 0,05$ serta arah koefisiennya negatif artinya H4 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya perubahan peningkatan ataupun penurunan kompleksitas di suatu daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh indikator variabel kompleksitas daerah yang digunakan peneliti kurang tepat. Jumlah kecamatan yang digunakan untuk mengukur variabel kompleksitas daerah di kota/kabupaten Sumatera Selatan untuk periode yang digunakan peneliti tidak mengalami perluasan yang besar namun peningkatan yang terjadi hanya sedikit untuk tahun 2015-2017 sehingga kompleksitas daerah tidak dapat diukur secara efektif.

Alasan lain yang mendasari adalah jumlah kecamatan di suatu daerah yang mengalami perluasan yang cukup besar akan memiliki banyak diversifikasi atau penambahan sehingga akan menyebabkan semakin kompleksnya pengendalian intern yang dilakukan. Dengan demikian semakin banyak jumlah kecamatan di suatu daerah maka, akan semakin banyak kasus kelemahan pengendalian intern yang terjadi seperti sulit mengimplementasikan sistem pengendalian pada pemerintah daerah. Namun yang terjadi

kompleksitas daerah tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Karena penambahan atau perluasan jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan tidak mengalami perluasan yang besar walaupun meningkat hanya sedikit terjadinya peningkatan atau penambahan jumlah kecamatan, dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik, sehingga pemerintah daerah masih bisa untuk mengimplementasikan pengendalian internnya dengan baik.

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartono, dkk. (2014) dan Puspitasari (2013), Putro (2014), Rachmawati dan Nur (2016) juga menemukan pengaruh hubungan yang positif antara kompleksitas daerah dengan kelemahan pengendalian intern. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2014) yang tidak menemukan hubungan antara kompleksitas daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan dan jumlah penduduk terhadap kelemahan pengendalian intern.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel independen yaitu belanja modal menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dibuktikan variabel X_5 atau belanja modal memiliki nilai t hitung 1 -1,435 dan nilai signifikan sebesar $0,158 > 0,05$ serta arah koefisiennya negatif artinya H_5 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa semakin meningkat jumlah belanja modal tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Meskipun belanja modal sering menjadi sasaran pemerintah daerah untuk melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah telah menerapkan pengendaliannya dengan baik sehingga jumlah kasus atau masalah mengenai pengendalian intern dapat diminimalisir. Selain karena pengendalian intern yang ditingkatkan dalam mengelola belanja modal ada hal lain yang menjadi alasan kenapa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern yaitu pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik dengan melakukan pengelolaan anggaran terutama belanja modal dengan efisien bertujuan untuk kepentingan publik/masyarakat.

Alasan lain yang mendasari adalah meningkat atau menurunnya belanja modal tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah yang memiliki belanja modal yang tinggi belum menjamin pengendalian internnya lebih baik daripada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal yang lebih rendah. Dengan demikian membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan melakukan penyelewengan terhadap belanja modal tersebut. Pada variabel belanja modal tingkat kecurangan atau penyelewengan yang semakin tinggi diasosiasikan dengan tingginya investasi publik maka akan semakin rendah pengendalian intern yang diterapkan di dalam pemerintah daerah tersebut. Dengan begitu pemerintah daerah melakukan peningkatan kualitas pengendalian intern agar pejabat daerah yang akan melakukan tindak korupsi dapat diminimalisir dengan dilakukannya pengawasan yang khusus.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Namun tidak konsisten dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Nurwati dan Trisnawati (2015), Halim (2015), Rachmawati dan Nur (2016) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, *size* (ukuran) pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah, dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan

pengendalian intern. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat kelemahan pengendalian intern juga akan tinggi dengan begitu pemerintah daerah akan semakin memperbaiki kualitas pengendalian internnya. *Size* (ukuran) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar atau kecilnya suatu ukuran pemerintah daerah serta-merta tidak dapat meningkatkan jumlah temuan kasus kelemahan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan ada beberapa bukti empiris juga yang menemukan hubungan terbalik dimana ukuran pemerintah yang besar akan menurunkan tingkat jumlah temuan kasus.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin meningkat atau menurunnya suatu pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah melakukan pengawasan terhadap hasil pendapatan agar tidak terjadinya tingkat kecurangan yang dilakukan oleh pejabat daerah yang tidak bertanggung jawab. Kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan jumlah kecamatan yang digunakan selama tahun 2015-2017 kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami perluasan namun tidak mengalami perluasan yang besar sehingga membuat kompleksitas daerah tidak dapat terukur secara efektif. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meningkat atau menurunnya jumlah anggaran belanja modal tidak berpengaruh terhadap jumlah temuan kasus tindak kecurangan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah menerapkan pengendalian intern yang baik terhadap pengelolaan belanjamodal.

REFERENSI

- Bastian, I. 2013. *Audit Sektor Publik (Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. 2015. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern. *Accounting Analysis Journal*, 4 (2).
- Hartono, R., Mahmud, A., & Utaminingsih, S.N. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram, Lombok*.
- Kristanto, S. B. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Intern. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, 9 (1): 41-62.
- Majid, A., Herwanti, T., & Fitriah, N. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, dan PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*, 6 (1): 1-21.
- Nurwati, I. & Trisnawati, R. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Martani, D. & Zaelani, F. 2014. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Studi Kasus di Indonesia*. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspitasari, T. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Daerah (SKPD) terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Putro, P.U.W. 2014. Pengaruh PDRB, Ukuran dan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *UNNES*. Semarang.
- Rachmawati, D. E. & Handayani, N. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4): 1-17.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Verawaty. 2017. *Accountability and Internet Financial Reporting of Local Government: An Indonesia Analysis*. Lambert Academic Publishing.
- Verawaty, Puspanita, I., & Sularti, E. 2019. Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *MBiA*, 18(2): 79-99.